

PENDIDIKAN ISLAM DALAM USAHA MENGATASI KEMISKINAN

Oleh : Nur Kholis

Doktor Ilmu Pendidikan, Alumni Univ. Negeri Jakarta
Dosen Luar Biasa IAIN Purwokerto dan Dosen Pascasarjana IAINU
Kebumen
e-mail: abdullahnurkholish@gmail.com

Abstract

Education is an absolute necessity for humans because through education they will acquire higher and exalted position. A country or region will be able to progress and develop if the people having higher knowledge and education. Therefore, education has a really significant role to overcome poverty. As we know, poverty is a common phenomenon in the community. It is a condition where the minimum physical needs for a normal life, especially food and health, cannot be achieved for a relatively long period of time. Poverty can be a very bad thing and give negative impacts on the survival of a person or the public. For that reason, to build a strong community and a strong need to be equipped with education.

Keywords: *education and poverty*

Abstrak

Pendidikan merupakan suatu keharusan dan mutlak bagi manusia, karena melalui pendidikan manusia akan memperoleh kedudukan atau derajat yang mulia. Negara atau wilayah akan dapat maju dan berkembang jika manusia sebagai penduduknya memiliki pengetahuan atau pendidikan yang tinggi. Kemiskinan merupakan hal yang sudah tidak asing lagi di lingkungan masyarakat. Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana pemenuhan kebutuhan fisik minimum untuk suatu kehidupan normal khususnya makanan dan pemeliharaan kesehatan tidak cukup secara terus menerus atau berlangsung dalam periode waktu yang relatif lama. Kemiskinan dapat menjadi hal sangat buruk atau berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup seseorang maupun masyarakat. Oleh karena itu, untuk membangun masyarakat yang kokoh dan kuat perlu dibekali dengan adanya pendidikan. Dengan demikian pendidikan dapat mengatasi adanya kemiskinan.

Kata kunci: *pendidikan dan kemiskinan*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan dalam pembangunan nasional muncul dua paradigma yang menjadi kiblat bagi pengambil kebijakan dalam pengembangan kebijakan pendidikan yaitu paradigma fungsional dan paradigma sosialisasi. Paradigma fungsional melihat bahwa keterbelakangan dan kemiskinan dikarenakan masyarakat tidak mempunyai cukup penduduk yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan sikap modern. Menurut pengalaman masyarakat di Barat, lembaga pendidikan formal sistem persekolahan merupakan lembaga utama mengembangkan pengetahuan, melatih kemampuan dan keahlian, dan menanamkan sikap modern para individu yang diperlukan dalam proses pembangunan. Bukti tersebut menunjukkan adanya kaitan yang erat antara pendidikan formal seseorang dan partisipasinya dalam pembangunan. Perkembangan lebih lanjut muncul, tesis *Human Investmen*, yang menyatakan bahwa investasi dalam diri manusia lebih menguntungkan, memiliki *economic rate of return* yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi dalam bidang fisik.

Sejalan dengan paradigma fungsional, paradigma sosialisasi melihat peranan pendidikan dalam pembangunan adalah mengembangkan kompetensi individu, kompetensi yang lebih tinggi tersebut diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan secara umum meningkatkan kemampuan warga masyarakat. Semakin banyak warga masyarakat yang memiliki kemampuan dalam pendidikan akan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, berdasarkan paradigma sosialisasi ini, pendidikan harus diperluas secara besar-besaran dan menyeluruh, kalau suatu bangsa menginginkan kemajuan.

Masalah kemiskinan merupakan problematika kemanusiaan yang telah mendunia dan hingga kini masih menjadi isu sentral di belahan bumi manapun. Selain bersifat laten dan aktual, kemiskinan adalah penyakit sosial ekonomi yang sering dialami oleh negara-negara berkembang. Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yaitu kemiskinan alami dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alami terjadi akibat sumber daya alam (SDA) yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan buatan diakibatkan oleh imbas dari para birokrat kurang

berkompeten dalam penguasaan ekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia, sehingga mengakibatkan susahnyanya untuk keluar dari kemelut kemiskinan tersebut dan bagaimana kebijakan pemerintah dalam pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan ketimbang dari pemerataan.

“Apa yang menjadi masalah mendasar dalam pendidikan untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia?”

Pada kesempatan ini penyusun mencoba memaparkan secara global masalah pendidikan dan kemiskinan di negara Indonesia dan mencoba untuk memberikan solusinya. Karena kemiskinan pada tataran kehidupan sosial masih menghantui masyarakat Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang sangat kompleks. Sebagai warga negara Indonesia, dalam mengentaskan kemiskinan tidak hanya bertumpu pada bantuan pemerintah saja namun di zaman globalisasi ini warga negara Indonesia dituntut untuk mempunyai kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul sehingga memungkinkan munculnya keunggulan individual yang dapat memberikan sumbangan kepada kemakmuran individu dan masyarakat.

B. ANALISIS MASALAH

Pendidikan merupakan hal yang sangat fundamental dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan merupakan faktor penentu perkembangan sosial dan ekonomi sosial yang lebih baik. Tidak hanya itu, pendidikan merupakan sarana yang paling strategis untuk mengangkat harkat dan martabat suatu bangsa. Saat ini pemerintah sangat memperhatikan segala aspek pendidikan yang ada untuk dikembangkan kembali agar pendidikan di Indonesia menjadi yang terdepan dalam pengentasan kemiskinan. Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi yang harus diberantas melalui pendidikan agar masyarakat mampu mengatasi masalah kemiskinan dengan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Melalui pendidikan yang tinggi diharapkan akan mampu melepaskan diri dari belenggu kemiskinan, mampu menghasilkan kreasi dan memproduksi hasil karya yang dapat ditawarkan ke dunia luar.

1. Pengertian Pendidikan Islam

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Menurut Ahmad Tafsir sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin (2001: 70) kata *tarbiyat* mengandung arti memelihara, membesarkan dan mendidik yang di dalamnya sudah termasuk mengandung makna mengajar atau *'allama*. Dari segi linguistik menurut Al-Attas istilah ilmu diterapkan dalam Islam mencakup keseluruhan hidup yang bersifat universal untuk menuntun hidup manusia menuju keselamatan. Sebagaimana dalam tulisannya: *From the point of view of linguistic usage, we must see that the fact that the term ilm has been applied in Islam to encompass the totality of life – the spiritual, intellectual, religious, cultural, individual and social – means that its character is universal, and that it is necessary to guide man to his salvation*. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dalam Achmadi (2005: 27) menyatakan, pendidikan pada umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelekt), dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakatnya. Sedangkan menurut Muhammad Yunus dan Qosim Bakri (1998: 37) pendidikan adalah segala pengaruh yang dipilih yang bertujuan untuk membantu siswa dalam rangka meningkatkan jasmani dan rohani serta akhlak (tingkah laku) sehingga sampai pada tujuan yang sempurna.

Menurut Abdur Rahman an Nahlawi tentang konsep Tarbiyah (pendidikan) dalam empat unsur :

- a. Memelihara pertumbuhan fitrah manusia.
- b. Mengarahkan perkembangan fitrah manusia menuju kesempurnaan.
- c. Mengembangkan potensi insani (sumber daya manusia) untuk mencapai kualitas tertentu.

- d. Melaksanakan usaha-usaha tersebut secara bertahap sesuai dengan irama perkembangan anak..

Dari kajian antropologi dan sosiologi secara sekilas dapat kita ketahui adanya tiga fungsi pendidikan :

- a. Mengembangkan wawasan subjek didik mengenai dirinya dan alam sekitarnya, sehingga dengannya akan timbul kemampuan membaca (analisis), akan mengembangkan kreativitas dan produktivitas.
- b. Melestarikan nilai-nilai insani yang akan menuntun jalan kehidupannya sehingga keberadaannya, baik secara individual maupun sosial lebih bermakna.
- c. Membuka pintu ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan dan kemajuan hidup bagi individu dan sosial. (Achmadi, 2005:33)

Menurut Achmadi (1992: 20) pendidikan Islam adalah sebagai usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya insani yang ada padanya menuju manusia seutuhnya (insan kamil) sesuai dengan norma Islam. Sedangkan menurut Marimba (1974: 23) pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.

Dalam kamus ilmiah populer, kata “miskin” mengandung arti tidak berharta (harta yang ada tidak mencukupi kebutuhan) atau *bokek*. Adapun kata “fakir” diartikan sebagai orang yang sangat miskin (KBBI, 1987: 891). Secara etimologi makna yang terkandung yaitu bahwa kemiskinan sarat dengan masalah konsumsi. Hal ini bermula sejak masa neo-klasik di mana kemiskinan hanya dilihat dari interaksi negatif (ketidakseimbangan) antara pekerja dan upah yang diperoleh. Menurut al-Fairuz Abadi dalam Al-Qamus “miskin” adalah orang yang tidak punya apa-apa atau orang-orang yang sangat butuh pertolongan dan boleh dikatakan miskin orang yang dihinakan oleh kemiskinan atau selainnya. Dengan kata lain miskin adalah orang yang hina karena fakir jadi miskin menurut bahasa adalah orang yang diam dikarenakan fakir. Menurut Yasin Ibrahim seperti yang diungkapkan oleh M. Ridlwan Mas’ud (2005: 55). Kemiskinan mempunyai arti lebih luas lagi yaitu

orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka kebalikan dari orang-orang kaya yang mampu memenuhi apa yang diperlukannya.

Dalam konsep Islam dijelaskan bahwa kemiskinan sebagai salah satu masalah yang perlu diselesaikan, akan tetapi juga merupakan ancaman yang perlu diberantas karena merupakan bahaya dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi harus ada upaya untuk mencari solusinya agar kemiskinan dapat diminimalisir atau dikurangi. Dalam al-Quran lafadh *al-masakin* dalam surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Menurut Abdul Hayy (1994: 36) kata miskin pada ayat di atas diartikan sebagai orang yang mempunyai sesuatu tetapi kurang dari nisab, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka atau orang-orang yang memiliki harta tetapi tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sendiri tanpa ada bantuan.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perkembangan arti definitif dari pada kemiskinan adalah sebuah keniscayaan. Berawal dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan komponen-komponen sosial dan moral. Kemiskinan timbul disebabkan oleh minimnya penyediaan lapangan kerja di berbagai sektor, baik sektor industri maupun pembangunan. Senada dengan pendapat di atas adalah bahwasanya kemiskinan ditimbulkan oleh ketidakadilan faktor

produksi atau kemiskinan adalah ketidakberdayaan masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh pemerintah sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplotasi. Arti definitif ini lebih dikenal dengan kemiskinan struktural.

Menurut Gunarso (2006: 86), kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri yang muncul di Eropa. Pada masa itu kaum miskin di Inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja pabrik yang sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan upah rendah, sehingga kemampuan daya belinya juga rendah. Mereka umumnya tinggal di pemukiman kumuh yang rawan terhadap penyakit sosial lainnya, seperti prostitusi, kriminalitas, pengangguran. Amerika Serikat sebagai negara maju juga dihadapi masalah kemiskinan, terutama pada masa depresi dan resesi ekonomi tahun 1930-an. Pada tahun 1960-an Amerika Serikat tercatat sebagai negara adi daya dan terkaya di dunia. Sebagian besar penduduknya hidup dalam kecukupan. Bahkan Amerika Serikat telah banyak memberi bantuan kepada negara-negara lain. Namun, di balik keadaan itu tercatat sebanyak 32 juta orang atau seperenam dari jumlah penduduknya tergolong miskin.

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

2. Indikator Kemiskinan

Kemiskinan merupakan problem di hampir semua negara. Baik itu negara maju atau negara yang sedang berkembang. Tingkat kompleksitas permasalahannya pun berbeda antara negara dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Di Indonesia sebagai negara berkembang, angka kemiskinan masih cukup tinggi. Oleh karena itu, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) membuat kriteria kemiskinan, agar dapat menyusun secara lengkap pengertian kemiskinan sehingga dapat diketahui dengan pasti jumlahnya dan cara tepat mengatasinya. Adapun kriteria statistik BPS tersebut antara lain sebagai berikut: (a) tidak miskin, mereka yang pengeluaran per orang per bulan lebih dari Rp 350.610 (b) hampir tidak miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 280.488 s/d. Rp 350.610 atau sekitar antara Rp 9.350 s/d. Rp11.687 per orang per hari. Jumlahnya mencapai 27,12 juta jiwa (c) hampir miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 233.740 s/d Rp 280.488 atau sekitar antara Rp 7.780 s/d Rp 9.350 per orang per hari. Jumlahnya mencapai 30,02 juta, (d) Miskin, dengan pengeluaran per orang perbulan per kepala Rp 233.740 ke bawah atau sekitar Rp 7.780 ke bawah per orang per hari. Jumlahnya mencapai 31 juta, (e) Sangat Miskin (kronis), tidak ada kriteria berapa pengeluaran per orang per hari. Tidak diketahui dengan pasti berapa jumlah pastinya. Namun, diperkirakan mencapai sekitar 15 juta.

Berdasar uraian di atas dapat dikemukakan, bahwa dalam mengatasi masalah kemiskinan diperlukan kajian yang menyeluruh (*comprehensif*), sehingga dapat dijadikan acuan dalam merancang program pembangunan kesejahteraan sosial yang lebih menekankan pada konsep pertolongan di bidang ekonomi. Pada konsep pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk menolong yang lemah atau tidak berdaya (*powerless*) agar mampu (berdaya) baik secara fisik, mental dan pikiran untuk mencapai kesejahteraan sosial hidupnya. Dalam konteks ini, mereka dipandang sebagai aktor yang mempunyai peran penting untuk mengatasi masalahnya.

3. Kebijakan Penuntasan Kemiskinan Melalui Pendidikan

Dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Hal ini berarti fakir miskin dan anak terlantar tersebut menjadi tanggung jawab negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk masa depan mereka. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk mendapatkan penghasilan dan tidak mempunyai sanak saudara. Miskin adalah orang yang mempunyai penghasilan, namun tidak dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, fakir miskin ini perlu perhatian khusus, terutama bagi pemerintah. Sasaran utama pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 adalah cerdasnya kehidupan bangsa, majunya kebudayaan nasional, dan kesejahteraan kehidupan rakyat Indonesia secara berkeadilan. Oleh karena itu perlu upaya pembangunan yang pada hakekatnya merupakan proses transformasi budaya menjadi peradaban bangsa yang maju, modern, dan demokratis.

Menurut Soedjiarto (2008: 311), pendidikan nasional diselenggarakan belum maksimal dan wajib belajar belum juga gratis. Padahal hal ini yang akan mampu meningkatkan produktivitas nasional dan selanjutnya akan mengikis kemiskinan. Kemiskinan pada hakekatnya merupakan akibat terbatasnya kesempatan kerja. Kesempatan kerja tertutup dapat disebabkan oleh kualifikasi kemampuan yang dituntut tidak terpenuhi dan tidak terpenuhinya kualifikasi kemampuan disebabkan karena tidak mengikuti pendidikan yang bermutu, memerlukan biaya yang tidak mungkin ditanggung oleh mereka yang miskin. Oleh karena itu masalah kemiskinan dapat diatasi melalui pemberian kesempatan untuk mengikuti program pendidikan dan berbagai latihan yang bermutu, seperti pendidikan gratis, pemberian beasiswa kepada peserta didik, dan kesempatan kerja yang luas serta pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam Soedjiarto (2008: 118), negara Indonesia dapat bertahan sebagai negara yang merdeka dan bermartabat apabila manusianya mampu mendukung : (a) Sistem politik demokrasi yang stabil berdasarkan Pancasila, (b) Sistem ekonomi nasional yang mantap infrastruktur teknologi,

infrastruktur fisik, infrastruktur tenaga manusia, berkembang wirausahanya, dan tumbuh pengusaha kecilnya, (c) Sistem pengembangan iptek yang tangguh, (d) Majunya kebudayaan dalam berbagai segi, baik kesenian, kesusasteraan, maupun dimensi kognitif dan normatif dari kebudayaan nasional, dan (e) Mantapnya etika sosial.

Menurut Gunarso (2006: 88) tantangan kemiskinan adalah kesenjangan antara desa dan kota. Proporsi penduduk miskin di pedesaan relatif lebih tinggi dibanding perkotaan. Data Susenas (National Social Ekonomi Survey) 2004 menunjukkan bahwa sekitar 69,0 % penduduk Indonesia termasuk penduduk miskin yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Selain itu juga tantangan yang sangat memilukan adalah kemiskinan dialami oleh kaum perempuan yang ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peranan wanita, terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta masih rendahnya angka pembangunan gender (*Gender-related Development Indeks, GDI*) dan angka Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Measurement, GEM*). Menurut Abudin Nata (2008: 154), untuk membangun sistem ekonomi yang adil adalah karena sistem perekonomian yang berlaku di masyarakat masih menggunakan sistem ekonomi yang saling mematikan, menghalalkan segala cara dan penuh persaingan, sehingga pihak yang memiliki modal yang besar, memiliki sarana, ilmu dan teknologi lebih dapat bersaing dibanding golongan pedagang kecil yang tidak memiliki modal yang besar. Dengan demikian, pedagang kecil dari golongan miskin dengan mudah dapat dimatikan oleh golongan ekonomi yang kuat. Menurut Ibnu Hazm dalam Amin Rais (1998: 111) prinsip keadilan dapat diwujudkan dengan prinsip pemerataan ekonomi bahwa kalau di tengah masyarakat ada kelompok kaya dan miskin, sudah jadi kewajiban kelompok kaya tadi untuk melakukan proses pemerataan sosial ekonomi ke seluruh masyarakat dan menjadi hak kelompok orang-orang di bawah miskin untuk mengambil haknya dari kelompok kaya.

Dalam Al-Qur'an prinsip tentang keadilan di sini ditegaskan didalam surat al-Hadid (57) ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ

Sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kami, dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka Kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil.

Menurut Santoso (2007: 89) tantangan selanjutnya adalah otonomi daerah di mana hal ini mempunyai peran yang sangat signifikan untuk mengentaskan atau menjerumuskan masyarakat dari kemiskinan. Sebab ketika meningkatnya peran keikutsertaan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan, maka tidak mustahil dalam jangka waktu yang relatif singkat kita akan bisa mengentaskan masyarakat dari kemiskinan pada skala nasional terutama dalam mendekati pelayanan dasar bagi masyarakat. Akan tetapi ketika pemerintah daerah kurang peka terhadap keadaan lingkungan sekitar, hal ini sangat berpotensi sekali untuk membawa masyarakat ke jurang kemiskinan, serta bisa menimbulkan bahaya laten dalam skala nasional.

Upaya penanggulangan kemiskinan Indonesia telah dilakukan dan menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan kemiskinan merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 dan dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun serta digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan tahunan.

Sebagai wujud gerakan bersama dalam mengatasi kemiskinan dan mencapai Tujuan Pembangunan Milenium, Strategi Nasional Pembangunan Kemiskinan (SPNK) telah disusun melalui proses partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan di Indonesia. Selain itu, sekitar 60% pemerintah kabupaten/ kota telah membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) dan menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai dasar arus utama

penanggulangan kemiskinan di daerah dan mendorong gerakan sosial dalam mengatasi kemiskinan.

Menurut Santoso (2007: 91) ada beberapa langkah jangka pendek yang diprioritaskan antara lain sebagai berikut:

- a. Mengurangi kesenjangan antar daerah dengan; (1) penyediaan sarana-sarana irigasi, air bersih dan sanitasi dasar terutama daerah-daerah langka sumber air bersih (2) pembangunan jalan, jembatan, dan dermaga daerah-daerah tertinggal (3) redistribusi sumber dana kepada daerah-daerah yang memiliki pendapatan rendah dengan instrumen Dana Alokasi Khusus (DAK) .
- b. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui bantuan dana stimulan untuk modal usaha, pelatihan keterampilan kerja dan meningkatkan investasi dan revitalisasi industri.
- c. Khusus untuk pemenuhan sarana hak dasar penduduk miskin diberikan pelayanan antara lain (1) pendidikan gratis sebagai penuntasan program belajar 9 tahun termasuk tunjangan bagi murid yang kurang mampu (2) jaminan pemeliharaan kesehatan gratis bagi penduduk miskin di puskesmas dan rumah sakit kelas tiga.

Melalui pendidikan yang bermutu dan merata akan melahirkan manusia terdidik yang cerdas, berkarakter, dan terampil atau profesional yang siap memasuki dunia kerja. Dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah membuka kesempatan kerja dan membayar pajak yang memungkinkan pemerintah memberikan kesejahteraan masyarakat, mampu membiayai tanggung jawab konstitusionalnya, yaitu memberikan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pemerintah memberikan konsentrasi penuh terhadap kemajuan dalam pembangunan bidang pendidikan di seluruh wilayah Indonesia dan menjadi agenda utama dalam mengentaskan kemiskinan untuk meningkatkan kualitas

sumber daya manusi, yang sangat diyakini dapat menjadi akselerator memajukan sumber daya manusia (SDM).

Masalah dasar pengentasan kemiskinan bermula dari sikap pemaknaan terhadap kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu hal yang alami dalam kehidupan. Dalam artian bahwa semakin meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kebutuhan pun akan semakin banyak. Pengentasan masalah kemiskinan ini bukan hanya kewajiban dari pemerintah, melainkan masyarakat pun harus menyadari bahwa penyakit sosial ini adalah tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Ketika terjalin kerja sama yang romantis baik dari pemerintah, nonpemerintah dan semua lini masyarakat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bermartabat.

2. Saran

Dalam mengatasi kemiskinan di era global sekarang ini diperlukan usaha-usaha yang lebih kreatif, inovatif, dan eksploratif. Selain itu, globalisasi membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia yang unggul untuk lebih eksploratif. Di dalam menghadapi zaman globalisasi ke depan mau tidak mau dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengetahuan, wawasan, *skill*, mentalitas, dan moralitas yang standarnya adalah standar nasional dan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hayy, Al-Farmawi, 1994. *Metode Tafsir Maudhu'i: suatu pengantar*, Suryan A. Jamrah (penerj.). Jakarta: Raja Grafindo.
- Achmadi, 1992. *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Fu'ad abd, Muhammad Al-Baqiy, 1364. *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz al-Qur'an al-Karim*, al-Qahirah: Dar al Kutub al-Mishriyyah.
- Jalaluddin, 2001. *Teologi Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marimba, Ahmad D. 1974. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: PT. Al maarif.
- Mas'ud, Muh. Ridwan, 2005. *Zakat dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogya: UII Press.
- Nata, Abuddin dkk, 2008. *Kajian Tematik Al-Quran tentang Konstruksi Sosial*, Bandung: Angkasa Raya.
- Nugroho, Gunarso Dwi, 2006. *Modul Globalisasi*. Banyumas. CV. Cahaya Pustaka.
- Rais, M. Amien, 1998. *Tauhid Sosial, Formula Menggempur Kesenjangan*, Bandung: Mizan.
- Santoso Slamet, dkk. 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Unsoed : Purwokerto.
- Santoso, Djoko, 2007. *Wawasan Kebangsaan*. Yogyakarta. The Indonesian Army Press.
- Siahaan, N.H.T. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Soedjiarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Jakarta: PT. Kompas
- Media Nusantara, 2008.
- Undang-Undang Dasar 1945*